

STRATEGI PEMEINAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATA MODOINDING

Varen C. Timbongol¹
Sofia E. Pangemanan²
Fanley N. Pangemanan³

Abstrak

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang memperhatikan pola kehidupan yang sedang berlangsung di masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan daerah perlu diperhatikan kondisi dan karakter kehidupan masyarakat yang nyata-nyata berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pertanian merupakan yang dahulunya hanya merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pada perkembangannya menjelma menjadi sebuah sektor yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Untuk itu dalam pengelolaan sektor ini diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Peran nyata sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten dengan mengembangkan ekonomi. Kecamatan Modoinding merupakan salah satu kecamatan yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah untuk pengembangan pertanian dengan didukung tanah yang subur, suhu udara yang dingin sehingga ideal untuk tanaman sayuran serta curah hujan yang cukup. Dengan sumberdaya tersebut masih diperlukan strategi dari pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pertanian yang ada di daerah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih Strategi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian di Kecamatan Modoinding, informan yang digunakan merupakan informan yang dipilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa ada 4 aspek strategi yang dilihat yakni aspek perencanaan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi dari keempat tersebut dapat disimpulkan belum optimalnya strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Modoinding. Dengan sumberdaya alam yang luar biasa tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengembangan yang baik serta dukungan fasilitas penunjang seperti peralatan dan dana.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Pertanian

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan yang penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau bekerja pada sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Wilayah pedesaan yang bercirikan pertanian sebagai basis ekonomi sedangkan wilayah perkotaan yang tidak lepas dari aktivitas ekonomi baik yang sifatnya industri, perdagangan maupun jasa mengalami pertentangan luar biasa di dalam pertumbuhan pembangunan. Dengan kemajuan yang dicapai sektor pertanian tanaman pangan, maka pembangunan sektor industri yang di dukung sektor pertanian juga semakin maju (Arsyad, 2009 : 10).

Pengelolaan sumber daya alam diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 beserta penjelasannya, dengan kata lain dalam mensejahterakan masyarakat melalui potensi yang ada harus merata dan tidak boleh dimonopoli. Isi pasal 33 UUD 1945 tersebut sebagai berikut; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tersebut diatur dalam undang-undang. Dari isi Kebijakan tersebut bahwa pemerintahlah yang menguasai dan mengusahakan potensi setiap daerah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat terutama masyarakat sekitar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah di beri wewenang yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi termasuk didalamnya sektor Pertanian.

Peran nyata sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten dengan mengembangkan ekonomi yang bersifat *resource based*. Atas dasar tersebut, potensi perekonomian pedesaan diharapkan akan menjadi determinan dari perekonomian nasional secara keseluruhan dan dengan demikian perubahan yang terjadi pada struktur perekonomian pedesaan perlu dicermati terutama dampaknya terhadap struktur kesempatan kerja dan pendapatan di wilayah pedesaan.

Sektor pertanian harus diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian. Berdasarkan kondisi yang dihadapi saat ini sektor pertanian harus menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan. Pengembangan sektor pertanian harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, prospek

pengembangan agribisnis dan agroindustri kedepan sangat baik, hal ini didukung dengan keadaan geografis dan letaknya sangat strategis, hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 2009 :12) Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah di pedesaan, merupakan suatu upaya pemerintah dalam menempatkan kawasan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kecil. Karena itu program pembangunan disentra pengembangan agribisnis pada hakekatnya adalah kegiatan awal untuk memacu pembangunan ekonomi pertanian pasca otonomi di pedesaan.

Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, memiliki potensi yang luar biasa dalam sektor pertanian, namun potensi tersebut tidak sepenuhnya merata pada setiap kecamatan. Potensi luar biasa dalam sektor pertanian di Minahasa Selatan ada di bagian Minahasa Selatan Atas khususnya Kecamatan Modoinding. Kecamatan Modoinding sudah dari dahulu terkenal dengan potensi pertanian yang luar biasa, didukung dengan letak geografis di ketinggian ±1600 m dari permukaan laut dengan udara yang dingin cocok untuk tanaman hortikultura.

Tanaman hortikultura (komoditi sayur-sayuran seperti kol, kentang, wortel, pilsai, dan batang bawang) di Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai potensi yang besar dan kualitas yang baik. Umumnya tanaman hortikultura bertumbuh dan berkembang dengan baik di Kecamatan Modoinding yang telah ditetapkan sebagai kawasan

pengembangan agropolitan. Berbagai komoditi hortikultura telah dipasarkan di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kontribusinya sangat besar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Melihat potensi tersebut peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting, karena sebagian besar anggota masyarakat di Kecamatan Modoinding menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perencanaan pembangunan daerah dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut. Perencanaan itu dapat dilakukan dengan pengembangan sektor pertanian hal tersebut dilakukan berdasarkan bahwa sektor pertanian sangat berkontribusi besar terhadap nilai PDRB di Kabupaten Minahasa Selatan. PDRB (produk domestik regional bruto) adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Dalam rangka pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan, Dinas Pertanian telah menetapkan strategi pengembangan seperti Program peningkatan ketahanan pangan: pengembangan pembibitan namun petani masih mengandalkan bibit sendiri, pengembangan jaringan irigasi namun masih adanya jaringan irigasi yang tidak teratur, pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi namun dari pengamatan sementara yang mendapatkan pupuk bersubsidi hanya orang tertentu saja, optimalisasi lahan

hortikultura namun masih adanya lahan yang belum digarap dengan baik, Promosi hasil pertanian/ perkebunan namun masih sekitar Daerah Provinsi Sulawesi utara saja, pelatihan penerapan teknologi pertanian namun petani masih mengandalkan pengetahuan yang turun temurun, pengembangan jalan usaha tani namun masih adanya jalan ke kebun yang masih susah diakses, pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan produksi pertanian, pencegahan penyakit ternak dan hama, pelatihan dan pembimbingan teknologi pertanian dan peternakan tepat guna.

Namun dari beberapa strategi yang telah diterapkan, terlihat belum efektif sepenuhnya, menurut pengamatan peneliti, masih kurangnya produksi sayuran di Kecamatan Modoinding yang dipasarkan, kurangnya peralatan pertanian hasil bantuan pemerintah, selain itu petani belum menggunakan pengetahuan teknologi terbaru dalam proses pertanian. Peneliti merasa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dalam rangka pembangunan pertanian di Kecamatan Modoinding belum berdampak signifikan jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Modoinding pada sektor pertanian. Permasalahan tidak efektifnya strategi dinas tersebut menurut peneliti adalah kurangnya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan pertanian, selain itu rentang kendali antara kantor Dinas Pertanian dan Kecamatan Modoinding yang jauh.

Potensi sektor pertanian yang dimiliki oleh daerah Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan sangat besar untuk memajukan daerah akan tetapi potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut belum begitu biasa

dimaksimalkan dengan baik karena belum berhasilnya strategi dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Modoinding selain itu tidak tersedianya pemasaran di daerah tersebut serta usaha pemasaran dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

Tinjauan Pustaka

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*", yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi (Schonder dalam Arifin, 2011: 235). Kemudian istilah strategi itu meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda atau lebih baik dari kompetitor untuk memberi nilai tambah kepada pelanggan sehingga mampu mencapai sasaran jangka menengah atau Panjang organisasi (Louis et al 2011:61). Menurut Ramlan Surbakti (2010:7) strategi dapat diartikan sebagai ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan Menarik jika kita tautkan dengan istilah politik yang oleh Lasswell disimpulkan sebagai masalah *who gets what, when, how*, atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Artinya, ada suatu usaha dan strategi dalam suatu proses politik mengenai "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana".

Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses

tersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (*formulation*), dan pelaksanaan (*implementation*) (Andrew, 2011: 25).

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

1. Tahap perumusan.

Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

2. Tahap pemutusan.

Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.

3. Tahap pelaksanaan.

Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.

4. Tahap penilaian.

Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya

Saparin (2009:43) memberikan pengertian sebagai berikut :

- Pemerintah ialah kata nama subyek yang berarti sendiri, misalnya pemerintah desa, pemerintah daerah dan sebagainya.
- Pemerintah ialah kata jadian, yang disebabkan arena subyek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan.z

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut David Apter pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. (Syafie 2010:11).

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. (Retnami 2010:8).

Menurut C.F Strong menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Huda (2012:28)

Sektor pertanian adalah salah satu penopang perekonomian suatu negara, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Peranan sektor ini dapat dikatakan cukup besar bagi perkembangan perekonomian negara yang bersangkutan.

1. Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian adalah upaya menyampaikan informasi (pesan) yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menggunakan inovasi teknologi pertanian baru. Umumnya pesan terdiri dari sejumlah simbol dan isi pesan inilah yang memperoleh perlakuan. Bentuk perlakuan tersebut memilih, menata, menyederhanakan, menyajikan dan lain-lain. Simbol yang mudah diamati dan paling banyak digunakan yaitu bahasa. Keputusan- keputusan yang dibuat oleh penyuluh pertanian atau sumber untuk memilih serta menata isi pesan dan simbol yang digunakan pada pesan dapat dikatakan teknik penyuluhan pertanian (Kusnadi 2011).

2. Dukungan sarana dan prasarana

Secara umum sarana dan prasarana penyuluhan pertanian adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan baik alat tersebut sebagai peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan. Sedang menurut Permentan Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sarana dan prasarana penyuluhan pertanian adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien, ketersediaan sarana prasarana penyuluhan yang memadai baik jenis maupun jumlahnya sangat dibutuhkan. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan pasal 31 ayat 1, bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

3. Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler 2004:7).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana datanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kecamatan Modinding. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain. Karena itu pula penelitian komparasi dan korelasi juga dimasukkan dalam kelompok penelitian deskriptif. (Suharsimi Arikunto.2015: 378).

Fokus dalam penelitian ini adalah Strategi dari Pemerintah Kabupaten

Minahasa Selatan dalam Pembangunan Sektor Pertanian yang dibidangi oleh Dinas Pertanian. Dengan menggunakan teori (Andrew, 2011: 25) tentang Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

1. Tahap perumusan.
2. Tahap pemutusan.
3. Tahap pelaksanaan.
4. Tahap penilaian.

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang – orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pertanian Minahasa Selatan
- b. Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kec. Modinding
- c. Pegawai Dinas Pertanian Minahasa Selatan
- d. Petani di Kecamatan Modinding

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data.

Hasil Penelitian

1. Tahap perumusan

Rancangan perumusan strategi merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Perumusan dalam strategi merupakan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Strategi merupakan suatu

proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis.

Tahapan rencana yang dilalui atau strategi, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategi. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup arena, sarana/vehicles, dan pembeda, tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau strategi, belum dicakup. Keputusan pentahapan atau strategi didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (resourc), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.

Sebelum memasuki tahap pelaksanaan program, dinas pertanian Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan proses perencanaan dengan melihat dari Analisis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah terutama di bidang pertanian untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Siagian (2014: 17) memberikan batasan atau pengertian strategi merupakan rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas program, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

2. Tahap pemutusan.

Pada umumnya keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada kualitas keputusan yang mereka ambil. Pengambilan keputusan menggunakan analisis yang ilmiah didasarkan atas logika, mempertimbangkan semua data yang tersedia, semua alternatif yang mungkin dan mengikuti langkah-langkah seperti: Tetapkan masalahnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; Konstruksikan kriteria keputusan dan tujuan; Rumuskan hubungan antara tujuan dan variabel-variabel yang ada; Identifikasi dan evaluasi alternatif yang ada; Pilih alternatif terbaik dan Laksanakan keputusan.

Menurut Kotler (2000:223), menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut :

a) Identifikasi masalah

Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.

b) Pengumpulan dan penganalisis data

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

c) Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.

3. Tahap pelaksanaan

Implementasi strategi (strategy implementation), yaitu proses manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Program, yaitu pernyataan aktivitas atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari usaha penelitian baru. Anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara terperinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Sekaligus menentukan laporan keuangan proforma yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan dinas. Prosedur atau standard operating procedures (SOP), yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan menggambarkan secara terperinci cara suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan bagian dari program-program dinas.

4. Tahap pelaksanaan

Implementasi strategi (strategy implementation), yaitu proses manajemen mewujudkan strategi dan

kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Program, yaitu pernyataan aktivitas atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari usaha penelitian baru. Anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara terperinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Sekaligus menentukan laporan keuangan proforma yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan dinas. Prosedur atau standard operating procedures (SOP), yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan menggambarkan secara terperinci cara suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan bagian dari program-program dinas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dan penelusuran data sekunder yang telah dilakukan peneliti dilapangan mengenai Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembangunan sektor pertanian di Kecamatan Modoinding, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan perumusan, peneliti menyimpulkan bahwa pihak Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan telah memiliki dokumen perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi (renstra) dinas, yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan berdasarkan visi dan misi dari kepala daerah serta program

kementerian pertanian. Yang dibahas pada waktu tertentu melalui masing-masing bidang.

2. Tahapan pemutusan strategi, Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan menyusunnya sesuai dengan kondisi yang ada di desa-desa yang dianalisis oleh Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Kecamatan Modoinding dan masing-masing bidang. Kemudian hasilnya dibawah ditingkat Kabupaten dan disesuaikan dengan anggaran serta program yang ada di Kementerian pertanian.
3. Tahapan pelaksanaan strategi, peneliti menyimpulkan dilapangan bahwa Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembangunan sektor pertanian telah berjalan, namun tidak merata dalam penerapannya selain itu juga secara kuantitas tidak mencukupi untuk petani yang ada di Kecamatan Modoinding.
4. Pada tahapan penilaian atau evaluasi peneliti menyimpulkan bahwa tahapan penilaian/ evaluasi dilaksanakan secara berkala dan tingkatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bidang. Dari hasil laporan tersebut, dinas kemudian menuangkannya dalam dokumen laporan kinerja dinas setiap tahunnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, peneliti dapat memberikan saran untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga pada tingkat implementasinya:

1. Dalam tahap perencanaan, untuk Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya mengadakan diskusi dengan petani

- untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam bertani, sehingga program prioritas yang akan dikerjakan di tahun selanjutnya dapat sesuai dengan harapan petani dan membangun sektor pertanian.
2. Dalam tahapan pemutusan strategi sebaiknya setiap bidang mempelajari dahulu program pemerintah pusat dalam program pengembangan pertanian lainnya kemudian disesuaikan dengan APBD dari kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya penerapannya pimpinan memperhatikan sumberdaya yang ada seperti tenaga kerja mapupun alat pendukung.
 3. Dalam tahap pelaksanaan, memaksimalkan peran dari balai Penyuluhan Pertanian yang ada di Kecamatan Modinding, karena BPP merupakan garda terdepan dalam pembangunan pertanian dari Dinas Pertanian. Selain itu pentingnya peningkatkan kapasitas dari pegawai yang ada di BPP Kecamatan.
 4. Dalam tahapan penilaian/ evaluasi, disarankan agar pentingnya pengawasan melakat dalam tahapan penilaian ini. Perlu juga memperhatikan sistematika penyusunan laporan dan disarankan juga perlu dibuatkan sebuah survey mengenai pembangunan pertanian yang diisi oleh petani di Kecamatan Modinding agar laporan yang dibuat dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan kondisi kesejahteraan petani di Kecamatan Modinding.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori-*

- Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta PT. Balai Pustaka
- Arikunto. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sagung Seto.
- Arsyad, L. 2009 *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- David, Downey, 2012, *Manajemen Agribisnis*, Buku Keempat, Jakarta:
- Andrew E. Sikula. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga. Bandung
- Fred R. David, 2010, *Manajemen Strategis*. Salemba Empat Jakarta
- Hoessein B, 2012, "Kebijakan Desentralisasi", *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II. No.02. Maret. 2002
- Huda N.2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung,
- Inu Kencana Syafie, M.Si,2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Mubyarto. 2009. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Kusnadi, N, dkk. 2011. *Analisis Efisiensi Usahatani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia*. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 29 No. 1. Mei 2011.
- Louis SG (2011). *Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. Edisi 12. New York : The McGraw-Hill Companies, Inc. Pp : 1382-1388.
- La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. 2015.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

- Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Maulina S.N. .2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya
- Mardikanto, Totok. 2009. Penyuluhan Pembangunan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pratomo, Satriyo. 2010. Analisis Peran Sektor Pertanian Sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Boyolali. Skripsi. FE UNS. Surakarta
- Pamudji*. 2009. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara
- Saparin, 2009. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Saadah. 2012. Adaptasi Beberapa Kultivar Bawang Merah Di Luar Musim. Eds. M. Cholil M. dkk . Prosiding Seminar Hasil Penelitiandan Pengkajian Komoditas Unggulan. Deptan. Balitbangtan. BPTP Karangploso. 210-225.
- Sugiyono*. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Retnami S. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2010.
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo
- Surianingrat B, 2012. Mengenal Ilmu Pemerintahan Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Syafiie I,K 2013, Etika Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumber-sumber Lainnya:
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - Peraturan Menti Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian